BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Politik Islam Hindia Belanda terbagi dalam bidang sosial, bidang politik, dan bidang ekonomi. Ketiga bidang ini memiliki benang merah yang saling berkaitan satu sama lain, karena itu kebijakan- kebijakan yang dibuat Belanda selalu terhubung dengan ketiga bidang tersebut. Ada 3 fase dalam perkembangan pendidikan di Hindia-Belanda pada abad ke-20. Tahun 1900-1915, pendidikan Barat dianggap sangat penting bagi pribumi, tahun 1915-1927, timbul reaksi yang menghendaki agar pendidikan bagi pribumi tidak melepaskan mereka dari kebudayaan aslinya, selanjutnya pada tahun 1927-1942 merupakan fase pengurangan pendidikan Barat yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, sejalan dengan keinginan mengadakan penghematan dalam bidang pendidikan dikarenakan situasi ekonomi keuangan pemerintah kolonial pada waktu itu. Ordonansi guru dikeluarkan pada tahun 1905 dan 1925, ordonansi tahun 1905 , no. 550, yang yang berisi mengenai kewajiban setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Sedang ordonansi tahun 1925, hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri.[176] Penghematan pendidikan pun dapat dikaitkan dengan

[176] Suminto,*Politik Islam Hindia Belanda*,53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan Belanda dalam bidang politik, karena pendidikan barat dapat memberikan kemungkinan bagi pribumi untuk menyaingi orang Eropa.

2. Menanggapi kebijakan- kebijakan yang diskriminatif tersebut muncul reaksi umat Islam Indonesia khususnya Partai Sarekat Islam. Sarekat Islam juga mengajukan tuntutan agar ditiadakannya diskriminasi terhadap murid- murid dan wajib belajar 15 tahun. Selain itu diadakan pula kongres Al-Islam tahun 1926, (1-5 Desember di Bogor) tentang pendirian sekolah liar.[177] Situasi sosial-ekonomi yang makin buruk menyebabkkan pergerakan lebih radikal dan revolusioner melahirkan reaksi pemogokan pegawai-pegawai pegadaian pada tahun 1922 dan pemogokan kaum buruh kereta api pada tahun 1923. Aspek politik pergerakan nasional pada tahun-tahun itu menunjukkan perubahan kearah anti-Belanda dan kearah aliran nonkooperasi. Delapan tuntutan Sarekat Islam kepada pemerintah Hindia Belanda, pertama mengenai politik SI menuntut berdirinya dewan-dewan daerah, perluasan hak-hak *Volksraad* (dewan rakyat), dengan tujuan untuk mentransformasikannya menjadi suatu lembaga perwakilan yang sesungguhnya untuk keperluan legislatif. Kedua, dalam bidang pendidikan partai menuntut penghapusan peraturan yang mendiskriminasikan penerimaan murid di sekolah-sekolah. Dan wajib belajar 15 tahun. Ketiga, dalam bidang agama partai menuntut dihapuskannya segala macam undang-undang. Dan peraturan yang menghambat tersebarnya Islam, pembayaran gaji Kiyai dan Penghulu, serta subsidi bagi lembaga-lembaga Islam dan pengakuan hari-hari besar Islam. Keempat, SI menuntut pemisahan

[177] Ibid., 55-56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara yudikatif dan eksekutif, dan menganggap perlu dibangun suatu hukum yang sama untuk menegakkan hak-hak yang sama di antara golongan penduduk negeri. Kelima, SI menuntut perbaikan dalam bidang agraria dan pertanian dengan menghapuskan *particuliere lenderijen* (milik tuan tanah),[178] dan dengan mengadakan ekspansi serta perbaikan irigasi. Keenam, tuntutan lain adalah agar industri-industri yang penting dinasionalisasi yaitu, industri-industri yang mempunyai sifat monopoli dan yang memenuhi pelayanan dan barang-barang yang bersifat pokok bagi rakyat banyak misalnya, industri tekstil, air, listrik, perhubungan dan gas. Ketujuh, dalam bidang keuangan dan perpajakan, partai menuntut adanya pajak-pajak berdasarkan proporsional serta pajak-pajak yang dipungut, terhadap laba perkebunan, SI juga menuntut adanya bantuan pemerintah bagi perkumpulan koperasi. Kedelapan, SI juga menuntut kemudahan bagi penduduk miskin untuk memperoleh perlindungan hukum.

[178] Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, 127- 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id